

EFEKTIFITAS KINERJA KOMITE MADRASAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Lisadiyah MF

Abstract

The education is well-administered in the event that Islamic school as education administration is able to provide a qualified teaching staff with the support of condition of the school environment and community surrounding the school which in fact lives in order and stability. This condition would be complete if, one of other determining factors, parents' involvement which in this matter is represented by the Islamic school committee is also able to perform properly its four main functions as advisory agency, supporting agency, controlling agency, and mediator. This research attempts to measure the effectiveness of performance of Islamic committee by way of observing the extent to which the foregoing functions may be appropriately performed.

Keywords: *effectiveness, Islamic school committee, education role*

A. Pendahuluan

Dalam tataran konsep, pentingnya peran orang tua dalam mendukung proses pendidikan sudah lama selesai. Konsep ini diterima tanpa ada penolakan sedikit pun. Semua sadar dan faham bahwa dalam proses pendidikan ada tiga faktor penting yang sangat berpengaruh, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kesadaran ini juga sejalan dengan aturan yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung

Dra. Lisadiyah MF adalah Peneliti pada
Puslitbang Pendidikan Agama dan
Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI

jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, seperti yang dinyatakan pada penjelasan pasal 25, ayat (1) butir 1, UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989.

Masalahnya, dalam tataran praktis, statemen yang seakan sederhana tersebut terasa sangat sulit dijalankan. Bila pendidikan dianalogikan sebagai sebuah mesin, ada saja salah satu dari tiga roda penggeraknya yang tak berjalan sempurna. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebenarnya merupakan upaya mensinergikan dukungan dan peran serta masyarakat, baik terdiri dari perorangan, kelompok, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi dan organisasi masyarakat lainnya maupun orang tua peserta didik untuk bersama-sama sekolah mengusahakan tercapainya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara demokratis dan akuntabel dalam rangka tujuan pendidikan nasional. Pertanyaannya, sudah efektifkah lembaga ini menjalankan fungsinya?

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 56 ayat 3 pun menegaskan bahwa komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberi pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Atas dasar itu, Departemen Agama melalui surat keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/409/2003 menyusun pedoman Pembentukan Komite Madrasah. Tujuan dibentuknya komite madrasah adalah; 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan 3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis, dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Lembaga mandiri komite madrasah ini merupakan perwakilan masyarakat yang tinggal di sekitar madrasah yang memiliki peran sebagai berikut: 1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah; 2) sebagai pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah; 3) sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di madrasah;

dan 4) sebagai *mediator* antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di lingkungan madrasah.

Sebagai *advisory agency*, komite madrasah harus proaktif dalam memberi masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada kepala, guru dan karyawan madrasah baik secara lisan maupun secara tulisan mengenai berbagai kebijakan yang akan dilakukan untuk pengembangan madrasah. Sebagai *supporting agency*, komite madrasah menjadi agen pemberdayaan madrasah melalui upaya-upaya yang akan dilakukan dengan memadukan kekuatan madrasah dengan *stakeholder*-nya. Sebagai *controlling agency*, komite madrasah berperan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan program, pelaksanaan program dan keluaran pendidikan di madrasah. Sedangkan sebagai *mediator*, komite madrasah berperan sebagai penghubung antara madrasah dengan masyarakat, madrasah dengan pemerintah, dan antara madrasah dengan dewan daerah. Kendala yang selama ini dihadapi madrasah adalah minimnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pendidikan di madrasah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang didukung dengan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat efektifitas kinerja komite terhadap mutu pendidikan madrasah, sedangkan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk penelusuran informasi tentang faktor pendukung dan penghambat kinerja komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Untuk mendapatkan informasi tentang keadaan madrasah dan komite madrasah pada wilayah sasaran penelitian, maka Kabid Mapenda dijadikan responden pertama. Responden selanjutnya adalah Ka.TU untuk memperoleh data tentang mutu pendidikan madrasah, Kamad dan Guru untuk mendapatkan informasi kinerja komite madrasah dan BPS setempat untuk mendapatkan informasi kondisi sosial masyarakat setempat. Sedangkan informasi tentang faktor pendukung dan penghambat kinerja komite diperoleh dari Ketua Komite Madrasah.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Komite Madrasah pada jenjang pendidikan Menengah (Madrasah Aliyah Swasta). Wilayah sampel diwakili oleh enam propinsi yang menjangkau wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur dan memiliki madrasah relatif banyak.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *proportional cluster random sampling*. Langkah *pertama* adalah menentukan wilayah penelitian yang dilakukan dengan klaster; *kedua*, menentukan jumlah sample MAS yang diambil dari wilayah tersebut dengan menggunakan rumus

proporsi; *ketiga*, merandom madrasah Aliyah Swasta yang dijadikan sampel penelitian.

Jumlah populasi dari seluruh lembaga Madrasah Aliyah Swasta sebanyak 2.029 lembaga. Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus proporsi¹, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, *margin of error* 5 % diperoleh hasil untuk Madrasah Aliyah sampel penelitian sebanyak 139 lembaga.

Untuk menganalisis data hasil penelitian digunakan metode statistika yaitu *pertama*, analisis deskripsi yang berguna untuk mengetahui skor kinerja komite dan skor mutu madrasah. *Kedua*, uji persyaratan analisis dan *ketiga*, analisis inferensial dengan menggunakan korelasi regresi yang berguna untuk mengetahui hubungan 4 peran komite madrasah dan kontribusinya bagi mutu pendidikan di madrasah.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada: bagaimanakah kinerja Komite Madrasah berjalan? Efektifkah kinerja Komite Madrasah terhadap peningkatan mutu pendidikan? Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan rangkaian pertanyaan lain seperti: seberapa efektif Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan (*Advisor Agency*), pendukung (*Supporting Agency*), pengontrol (*Controlling Agency*), dan penghubung (*Mediator*) dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah? Selanjutnya juga dikaji apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Komite Madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan?

Dengan menjawab rangkaian pertanyaan di atas diharapkan akan didapat gambaran mendalam tentang kinerja Komite Madrasah. Akan terukur efektifitas kinerja Komite Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan akan terjawab pula seberapa besar peran Komite Madrasah—keempat peran utamanya—, dalam memajukan pendidikan madrasah. Dengan menganalisis hasil penelitian diharapkan dapat dijelaskan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi komite dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Direktorat Pendidikan Islam Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, sebagai informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan tentang pemberdayaan Komite Madrasah.

¹ Tabel hasil penghitungan proporsi didapatkan dari *Workshop Pelatihan Peningkatan Wawasan dan Ketrampilan Penelitian* pada tanggal 14 Maret 2007 di Bogor, oleh Muhammad Husein, LP3 ES.

B. Kerangka Teori

Secara terminologis, istilah efektifitas (*effectiveness*) dimengerti dengan kandungan makna (*semantical domain*) yang beragam tergantung pada perspektif yang digunakan. Misalnya, dalam teori-teori perilaku organisasi atau manajemen, dikenal dua pendekatan atau model untuk memahami makna atau konsep efektifitas. Secara luas, konsep efektifitas berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, bagaimana tingkat daya fungsi unsur/komponen organisasi, serta tingkat kepuasan anggota organisasi. Ketiganya sebenarnya merujuk pada pengertian yang sama yaitu efektifitas organisasi, hanya berbeda dalam penekanan, fokus atau perspektif yang digunakan. Dengan demikian, konsep efektifitas peran komite, menyangkut masalah bagaimana/sejauhmana tingkat ketercapaian tujuan dalam pemerannya, dalam mendayagunakan fungsinya sebagai komite serta tercapainya tingkat kepuasan oleh *stakeholder*-nya.

Istilah “kinerja” sebagai terjemahan dari kata “performance” berasal dari akar kata “*to perform*” yang berarti: (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan, (2) memenuhi dan menjalankan kewajiban, (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab, dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang.²

Menurut Hellriegel, kinerja mengacu pada tingkat keberhasilan kerja dari seseorang.³ Batasan kinerja tersebut menunjukkan keberhasilan seorang pegawai di dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mencapai tujuan pekerjaan (*task*) di dalam suatu organisasi. Kinerja seorang pegawai terkait dengan tugas yang diberikan penyelenggara suatu Institusi dalam rangka pencapaian tujuannya. Sedangkan Schermerhorn, mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan seseorang atau kelompok di dalam unit kerja.⁴

²Sujadi Prawirosentono. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta : BPFE, h. 1-2.

³Don Hellriegel and John W. Slocum Jr. 1994. *Management*. Philippines Addison-Wesley: Publishing Company Inc., h. 497.

⁴John R. Schermerhorn, Jr. James G. hunt, Richard N. Osborn. 1994. *Management Organization Behavior*. New York: John Wiley & son Inc., h. 147.

Indikator dalam kinerja Komite Madrasah dikelompokkan pada 4 (empat) peran, yaitu; 1) *Advisor Agency* (pemberi pertimbangan) dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di madrasah; 2) *Supporting Agency* (pendukung), baik yang berwujud dana atau finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah; 3) *Controlling Agency* (pengontrol) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di madrasah; dan 4) *Mediator* (penghubung) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat lingkungan madrasah.

Dari peran tersebut, Komite Madrasah mempunyai 7 (tujuh) fungsi sebagai berikut: mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Fungsi lainnya adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah, kriteria kinerja satuan pendidikan, tenaga pendidikan, dan fasilitas pendidikan.

Selain itu, Komite Madrasah juga berfungsi mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung mutu dan pemerataan pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Menurut Sallis, konsep mutu memiliki tiga pengertian, antara lain: (1) mutu sebagai konsep yang absolut atau mutlak, (2) mutu dalam konsep yang relatif, dan (3) mutu menurut konsumen. Dalam pengertian absolut, mutu dianggap sebagai sesuatu yang ideal; artinya sudah tidak ada yang melebihi. Bila dipraktekkan dalam dunia pendidikan, konsep mutu yang absolut ini bersifat elitis, karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan mutu tinggi kepada siswa dan hanya sedikit pula siswa yang akan mampu membayarnya.⁵

⁵ Sallis Edward. 1993. *Total Quality Mangement in Education*. London; Kogan page, h. 22-24.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses dan *output*. *Input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. *Input* pendidikan terdiri dari: (a) *input* sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (kepala madrasah, guru dan karyawan, siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya), (b) *input* perangkat lunak, yakni struktur organisasi madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, dan lain-lain, (c) *input* harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai madrasah.

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (madrasah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Sedangkan *output* pendidikan merupakan kinerja sekolah/madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi yang dihasilkan dari proses dan perilaku madrasah, khususnya dalam prestasi belajar siswa. Dengan demikian, madrasah dapat dikatakan bermutu tinggi apabila telah mempersiapkan *input*-nya dengan baik untuk kemudian diproses dengan pengkoordinasian, penyerasian dan pemaduan *input* madrasah yang harmonis sehingga *output* madrasah bermutu tinggi.

C. Efektifitas Kinerja Komite Madrasah

Deskripsi tentang kinerja Komite Madrasah dan mutu madrasah diperoleh dari penilaian langsung oleh kepala sekolah dan guru yang secara keseluruhan meliputi 278 orang. Responden diberi pertanyaan yang sama yaitu tentang kinerja Komite Madrasah dalam memerankan tugas dan fungsinya. Sedangkan deskripsi tentang faktor penghambat dan pendukung kinerja komite diperoleh dari pernyataan ketua komite.

Pertanyaan terhadap kinerja komite, yang pada prinsipnya pengukuran kinerja komite, bertujuan menilai sejauhmana komite mampu memerankan 4 peran komite. Jumlah item pertanyaan dari masing-masing peran berbeda-beda. Untuk pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) memiliki 36 item. Untuk peran sebagai pemberi pendukung (*Supporting Agency*) jumlah pertanyaan sebanyak 12 item. Selanjutnya peran sebagai badan pengontrol (*Controlling Agency*) terdapat 9 item dan peran komite yang keempat sebagai penghubung (*Mediator*) sebanyak 5 item.

Selain pertanyaan berkaitan dengan 4 peran komite, juga ditanyakan mengenai mutu madrasah. Mutu dalam hal ini diukur dengan 8 indikator. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator ketenagaan ada 10 butir, berkaitan dengan TU 7 butir, berkaitan dengan kesiswaan 8 butir, berkaitan dengan sarana prasarana 34 butir, berkaitan dengan kurikulum 7 butir, berkaitan dengan pendanaan 15 butir, berkaitan dengan pelaksanaan PBM 14 butir dan berkaitan dengan evaluasi 9 butir. Jadi, seluruhnya terdapat 104 butir pertanyaan.

Hasil analisis Komite Madrasah menunjukkan bahwa Komite Madrasah memainkan fungsinya sebagai alat pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah. Peranan Komite Madrasah pada aspek *advisory*, baik menurut pendapat kepala madrasah, ketua komite maupun guru, masih ada 13,9% yang mengatakan peran komite masih pada kategori rendah karena belum pernah menerima sosialisasi peranan dan fungsi komite sebagai pemberi pertimbangan tentang program dan kebijakan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal untuk mensosialisasikan program-program komite terkait dengan kedudukan dalam pengambilan keputusan yang merupakan langkah strategis bagi peningkatan mutu layanan pendidikan madrasah.

Meski fungsi sebagai *Supporting Agency* sangat penting dalam mendukung kemajuan pendidikan madrasah, hasil analisis kurang mengembirakan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 139 lembaga, pendapat kepala madrasah, ketua komite, maupun guru menunjukkan kinerja komite madrasah dalam melakukan *Supporting Agency* masih rendah (14,1%) dan sangat rendah (1,4%).

Berbeda dengan fungsi *Supporting Agency*, penilaian terhadap kinerja Komite Madrasah sebagai fungsi *Controlling* menurut pendapat kepala sekolah, ketua komite, maupun guru pada madrasah, dari 417 pendapat, cukup tinggi, yakni 163 dari 417 orang (39,1%). Tingginya peran aspek *Controlling* ini diduga karena dalam operasionalnya tidak membutuhkan biaya banyak.

Peranan komite madrasah dalam menjalankan fungsi *Mediator*, menurut pendapat kepala madrasah, ketua komite, dan guru kinerjanya masih rendah, yakni 17,3% atau 72 pendapat dari 417. Dan yang sangat rendah masih ada 5,8% yaitu 24 dari 417 pendapat. Rendahnya peran Komite Madrasah pada aspek *Mediator* ini diduga, khususnya yang berstatus swasta, antara pihak sekolah dan masyarakat belum

tumbuh kesadaran untuk bekerjasama. Komite belum berperan untuk memberikan sumbangan pikiran, waktu, tenaga yang diperlukan madrasah. Bagi madrasah yang kinerjanya tinggi sudah mencapai 32,1% (134 dari 417 orang). Hal ini dipengaruhi oleh madrasah swasta yang tumbuh dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Adapun analisis terhadap mutu pendidikan di madrasah dari 139 lembaga yang disurvei ternyata tidak ada madrasah yang memiliki skor mutu sangat tinggi dan sangat rendah. Hasil penelitian menunjukkan 92 lembaga (66,2%) memiliki mutu berkategori sedang, 17 lembaga (12,2%) berkategori rendah dan 30 lembaga (21,6) berkategori tinggi.

D. Faktor Pendukung Kinerja Komite

Keterbukaan pihak madrasah dalam merespon masukan dari komite sekolah dalam menjalankan fungsi pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) adalah faktor pendukung *pertama* kinerja komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah. Hal ini terjadi karena antara Komite Madrasah dengan komunitas sekolah terjalin hubungan dan komunikasi yang baik. Begitu juga dalam perencanaan program pendidikan, madrasah terbuka dan transparan, serta sumber daya manusia yang ada juga cukup memadai. Dengan demikian, Komite Madrasah juga dilibatkan dalam pelaksanaan program pendidikan. Komite Madrasah juga dapat memberikan pertimbangan dan dilibatkan untuk mengatur proses pembelajaran di madrasah dengan jumlah guru yang ada dengan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya agar proses PBM dapat tercapai sesuai dengan kurikulum yang ada. Komite Madrasah dalam memberikan pertimbangan terhadap anggaran madrasah melibatkan partisipasi orang tua murid dengan iuran BP3 dan SPP bulanan, di samping dana APBM dari pemerintah yang dikelola secara transparan dengan membuat laporan setiap kegiatan sekolah.

Kedua, peran komite sebagai *Supporting Agency* mendorong pihak-pihak lain untuk berpartisipasi dalam pendidikan di madrasah, melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik itu perusahaan, maupun donatur-donatur yang dapat membantu peningkatan mutu pendidikan di madrasah baik secara moril maupun materil. Untuk itu, Komite Madrasah sebagai pihak ketiga dalam peningkatan mutu pendidikan mampu melakukan kerjasama dengan pihak luar baik itu orang tua murid maupun *stakeholder* lain untuk mendukung pendidikan di madrasah. Dengan jumlah siswa yang banyak, dukungan dari yayasan pendukung,

stakeholder yang menjadi donatur, serta iuran-iuran lain yang membantu pembiayaan madrasah, Komite Madrasah menggalang dana dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Ketiga, peran komite sebagai pengontrol (*Controlling*) dapat dilaksanakan dengan baik karena SDM dalam mengontrol perencanaan program cukup memadai. Pihak madrasah sering melakukan pertemuan dengan Komite Madrasah tentang pelaporan kegiatan madrasah, melakukan sosialisasi terhadap perencanaan program yang telah ditetapkan, serta melakukan rapat koordinasi dan mengevaluasi program yang sedang berjalan dalam hubungan yang harmonis.

Keempat, di beberapa daerah Komite Madrasah mempunyai tenaga ahli, populer di masyarakat dan memiliki hubungan luas yang siap untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan berbagai masalah pendidikan di madrasah. Ini menjadikan komite mampu menjalankan peran pendukung sebagai penghubung (*Mediator*) dalam peningkatan mutu pendidikan. Ini menjadikan komite mampu melaksanakan pertemuan rutin dan dialog antara madrasah dan masyarakat untuk penyampaian program madrasah dan terciptanya jalinan kerjasama yang baik yang dapat mendorong tumbuhnya perhatian dan kemitraan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan, komite mempunyai tempat untuk menerima aspirasi dari masyarakat terhadap madrasah dan komite akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pihak sekolah sebagai perbaikan ke depan, melakukan musyawarah dengan wali murid dan madrasah secara periodik untuk menampung aspirasi, melakukan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dan masyarakat.

E. Faktor Penghambat Kinerja Komite

Beberapa faktor penghambat Komite Madrasah adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pendidikan, kemudian diikuti minimnya pengetahuan, pengalaman masyarakat dan komite terhadap pendidikan, disamping sarana dan prasarana yang tersedia juga sangat kurang. Ini menghambat upaya memaksimalkan fungsi *Advisory Agency* dari komite dalam memberi pertimbangan terhadap perencanaan program pendidikan.

Pelaksanaan program pendidikan di madrasah juga mengalami hambatan-hambatan karena minimnya upah guru. Jadi, konsentrasi guru tidak terfokus dalam PBM karena adanya keinginan untuk mencari

sampingan dari luar. Kurangnya sarana dan prasarana di madrasah dalam menunjang proses belajar dan pembelajaran. Komite madrasah dalam memberikan pertimbangan terhadap anggaran madrasah mengalami hambatan untuk pendanaan madrasah karena masih kurangnya sumber dana dari pihak lain, baik dari orang tua siswa maupun donatur lain yang mau bekerjasama dengan madrasah. Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa pada umumnya menengah kebawah, kurang lancarnya pembayaran SPP dari siswa. Jadi, anggaran madrasah sangat minim untuk memfasilitasi dan melengkapi sarana dan prasarana agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif.

Penghambat peran komite sebagai *Supporting Agency* dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah di antaranya kinerja komite dalam mendorong pihak-pihak lain untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan masih kurang, kurang bagusnya pendidikan madrasah di mata masyarakat, belum terjalinnya hubungan masyarakat dengan madrasah, kesibukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya (ekonomi lemah), masyarakat melihat kurangnya prestasi madrasah dalam dunia pendidikan, kurangnya sarana komunikasi madrasah dan pengetahuan serta pengalaman masyarakat pada umumnya masih kurang terhadap dunia pendidikan, masih kurangnya yayasan yang mensubsidi madrasah, komunikasi yang kurang untuk kepentingan bersama dalam memajukan pendidikan, tingkat rata-rata ekonomi wali murid masih rendah, serta adanya *image* sekolah gratis dari orang tua wali murid setelah ada dana BOS.

Faktor penghambat kinerja komite sebagai *Controlling* perencanaan program pendidikan adalah alat dan media yang tidak menunjang sama sekali, masih kurangnya sosialisasi dan memberikan kesempatan kepada partisipan, kurangnya perencanaan dalam membuat perencanaan pendidikan, kurang fokusnya sebagian anggota komite terhadap kurikulum madrasah, kurang profesionalnya anggota komite dalam perencanaan pendidikan madrasah. Komite kurang melakukan pengontrolan terhadap kinerja madrasah karena kesibukan anggota komite sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik, kurang sesuainya anggaran dengan pelaksanaan program, jumlah pengawas kurang memadai, waktu yang tidak mencukupi untuk mengawasi setiap program madrasah.

Faktor penghambat kinerja komite madrasah sebagai *Mediator* dalam peningkatan mutu pendidikan di antaranya; untuk mendorong tumbuhnya perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan madrasah belum berjalan dengan baik karena minimnya dana pada madrasah,

kesungguhan dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan belum ada, masih ada hubungan yang kurang harmonis antara madrasah dengan masyarakat, anggota komite kurang aktif mengikuti kegiatan madrasah, masyarakat menginginkan pendidikan yang bermutu tapi kurang mendukung peningkatan mutu pendidikan madrasah, banyaknya komite yang kurang mengerti mengenai pendidikan (jadi pelaksanaan program pendidikan diserahkan kepada pihak madrasah), keberpihakan terhadap pendidikan madrasah masih kurang, fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai untuk peningkatan mutu pendidikan madrasah.

F. Uji Persyaratan Analisis

Sebelum data dianalisis dalam bentuk inferensial, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, yaitu : 1) keacakan sampel, 2) kenormalan distribusi populasi, 3) keberartian model regresi, 4) kelinearan garis persamaan regresi.⁶

Dalam penelitian ini persyaratan keacakan sampel sudah terpenuhi melalui teknik pengambilan sampel yang dilakukan. Persyaratan berikutnya akan dipenuhi dengan menguji normalitas populasi dari kelima variabel yaitu variabel peran komite aspek *Advisory Agency*, peran komite aspek *Supporting Agency*, peran komite aspek *Controlling Agency*, peran komite aspek *Mediator* dan mutu pendidikan madrasah. Selanjutnya diuji signifikansi model regresi dan linearitas dari lima buah persamaan regresi sederhana, sebagai persyaratan dalam pengujian hipotesis.

Untuk menguji apakah sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal maka data dianalisis menggunakan *Kolmogorof-smirnov*. Kriteria pengujian adalah diterima hipotesis nol (H_0) jika angka probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Hasil Uji Normalitas dari 5 sampel sebagai berikut: Dari hasil pengujian varians tingkat skor Peran Komite Aspek *Advisory*, Aspek *Supporting*, Aspek *Controlling*, Aspek *Mediator* dan tingkat skor mutu madrasah, secara berturut-turut menunjukkan angka probabilitas 0,907; 0,054; 0,212; 0,171; dan 0,646. Semua angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga diinterpretasikan semua varians berdistribusi normal. Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat dilakukan.

⁶ Sudjana. 1992. *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*. Bandung: Tarsito, h.45.

G. Analisis Korelasi (Uji Regresi Sederhana)

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini akan menguji hubungan antara tingkat peran komite aspek *Advisory Agency*, *Supporting Agency*, *Controlling Agency* dan *Mediator* terhadap tingkat mutu pendidikan madrasah.

Untuk menghitung korelasi antara variabel-variabel tersebut digunakan Uji Regresi Sederhana, agar dapat diketahui kelinieran, keterhubungan dan kekuatan pada variabel yang diuji. Variabel yang mempengaruhi (independen) adalah tingkat peran komite aspek *Advisory Agency* (X1), *Supporting Agency* (X2), *Controlling Agency* (X3) dan tingkat peran komite aspek *Mediator* (X4). Sedangkan variabel yang dipengaruhi (dependen) adalah tingkat mutu madrasah (Y).

Dalam penghitungan korelasi, nilai berkisar antara $\pm 0,00$ s/d 1,00 (tanda + menunjukkan arah yang positif, tanda - menunjukkan arah hubungan negatif). Sedangkan kriteria penafsirannya adalah:

“Nilai 0,70 s/d - 1,00 (baik plus atau minus) menunjukkan derajat asosiasi yang tinggi

“Nilai 0,40 s/d - < 0,70 (baik plus atau minus) artinya menunjukkan hubungan yang substansial

“Nilai 0,20 s/d - < 0,40 (baik plus atau minus) artinya menunjukkan derajat asosiasi lemah/rendah

“Nilai < 0,20 (baik plus atau minus) menunjukkan hubungan yang dapat diabaikan ⁷

Hubungan Tingkat Peran Komite sebagai Pemberi Pertimbangan (Advisory Agency) dengan Mutu Pendidikan

Analisis regresi sederhana diperoleh hasil hubungan tingkat peran komite aspek *Advisory Agency* dengan mutu pendidikan di madrasah menunjukkan hubungan positif. Maksudnya semakin komite berperan aktif dalam memberikan pertimbangan terhadap program pendidikan madrasah maka akan semakin bermutu tingkat pendidikan madrasah. Hasil penghitungan setelah dirangkum dapat dijabarkan dalam uraian di bawah ini.

Bentuk persamaan regresi $\hat{y} = 288,15 + 0,753 X1$ dapat dijelaskan bahwa skor rata-rata kinerja komite aspek *Advisory* adalah sebesar

⁷ Wahid Sulaiman. 2002. *Jalan Pintas Menguasai SPSS 10*. Yogyakarta: Penerbit Andi, h. 112.

288,15 dan jika kinerja komite aspek *Advisory* meningkat satu skor maka skor tingkat mutu madrasah akan meningkat sebesar 0,753. Harga t- hitung 12,176 lebih besar dari t-tabel 1,66. Dengan demikian, analisis korelasi dapat dinyatakan bahwa kinerja komite aspek *Advisory* berhubungan positif dengan tingkat mutu pendidikan di madrasah. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi komite memerankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi pertimbangan terhadap program-program madrasah maka akan semakin tinggi tingkat mutu madrasah.

Hubungan Tingkat Peran Komite sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) dengan Mutu Pendidikan

Dari perhitungan regresi sederhana diperoleh hubungan peran komite aspek *Supporting Agency* dengan mutu pendidikan di madrasah sebesar 0.426. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif. Maksudnya semakin anggota komite berperan aktif dalam pemberdayaan madrasah melalui upaya-upaya memadukan kekuatan madrasah dengan *stakeholder*-nya, maka akan semakin bermutu tingkat pendidikan madrasah. Hasil penghitungan setelah dirangkum dapat diuraikan di bawah ini.

Bentuk persamaan regresi $\hat{y} = 238,42 + 2.117 X_2$ dapat dijelaskan bahwa skor rata-rata kinerja komite aspek *Supporting* adalah sebesar 238,42 dan jika kinerja komite aspek *Supporting* meningkat satu skor maka skor tingkat mutu madrasah akan meningkat sebesar 2.117. Harga t-hitung juga lebih besar dari t-tabel. Dengan demikian, analisis korelasi dapat dinyatakan bahwa kinerja komite aspek *Supporting* berhubungan positif dengan tingkat mutu pendidikan di madrasah.

Hubungan Tingkat Peran Komite sebagai Pengontrol (*Controlling Agency*) dengan Mutu Pendidikan

Hubungan tingkat peran komite sebagai pengontrol, berdasarkan penghitungan analisis regresi menunjukkan hubungan yang substansial dengan arah yang positif. Setelah dirangkum hasil penghitungan dapat diurai sebagai berikut.

Bentuk persamaan regresi $\hat{y} = 235,25 + 2,799 X_3$ dapat dijelaskan bahwa skor rata-rata kinerja komite aspek *Controlling* sebesar 235,25 dan jika kinerja komite aspek *Controlling* meningkat satu skor maka skor tingkat mutu madrasah akan meningkat sebesar 2,799. Harga t- hitung 14,957 lebih besar dari t-tabel 1,66. Dengan demikian, analisis

korelasi dapat dinyatakan bahwa kinerja komite aspek *Controlling* berhubungan positif dengan tingkat mutu pendidikan di madrasah. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi komite memerankan tugas dan fungsinya sebagai *Controlling* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan akan semakin tinggi tingkat mutu madrasah.

Hubungan Tingkat Peran Komite sebagai Penghubung (Mediator) dengan Mutu Pendidikan

Analisis regresi terhadap hubungan tingkat peran komite aspek *Mediator* dengan mutu pendidikan di madrasah sebesar 0.303 dengan arah yang positif. Artinya semakin anggota komite berperan aktif melakukan kerjasama, memberikan sumbangan pikiran, waktu, tenaga yang diperlukan oleh madrasah maka akan semakin bermutu tingkat pendidikan madrasah. Interpretasi dari hasil penghitungan korelasi ini termasuk dalam kategori tingkat hubungannya rendah namun masih memberi kontribusi sebesar 9,2 %.

Bentuk persamaan regresi $\hat{y} = 272,48 + 3.196 X_4$ dapat dijelaskan bahwa skor rata-rata kinerja komite aspek *Mediator* sebesar 272,48 dan jika kinerja komite aspek *Mediator* meningkat satu skor maka skor tingkat mutu madrasah akan meningkat sebesar 3,196.

Hubungan 4 Peran Komite secara Bersama-sama (Parsial) dengan Mutu Pendidikan Madrasah

Hasil penghitungan Analisis Parsial antara tingkat kinerja komite aspek *Advisory*, *Supporting*, *Controlling* dan *Mediator* dilakukan bersama-sama dengan tingkat mutu madrasah, ternyata mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan dilakukan masing-masing aspek. Berdasarkan tabel 12 koefisien korelasi sebesar (0.485) menunjukkan hubungan yang substansial dengan arah positif. Ini berarti semakin anggota komite melakukan empat peran secara bersama-sama akan semakin lebih bermutu tingkat pendidikan madrasah, daripada dilakukan hanya masing-masing aspek.

Koefisien determinasi (r^2) yang diperoleh sebesar 0,235. Hal ini menunjukkan bahwa 23,5% variasi tingkat mutu pendidikan madrasah ditentukan oleh kinerja komite madrasah.

H. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belum semua Komite Madrasah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam rangka membantu madrasah meningkatkan mutu pendidikannya. Hal ini tercermin pada temuan 13,9% Komite Madrasah yang masih rendah kinerjanya pada aspek *Advisory Agency*, 14,1%, masih rendah kinerjanya pada aspek *Supporting Agency*, 14,3% masih rendah kinerjanya pada aspek *Controlling*, dan 17,3% masih rendah peran dan fungsinya pada aspek *Mediator*. Bahkan masih ada Komite Madrasah yang masuk kategori sangat rendah peran dan fungsinya pada aspek *Advisory Agency* (0,7%), *Supporting Agency* (1,4%), *Controlling* (3,6%), dan aspek *Mediator* (5,8%).
2. Berdasarkan uji korelasi, kinerja Komite Madrasah mempunyai kontribusi positif terhadap mutu pendidikan madrasah. Aspek *Controlling* berkontribusi paling tinggi (20,8%), berikutnya aspek *Supporting* (18,1%), *Advisory Agency* (17,4%), dan aspek *Mediator* berkontribusi terhadap mutu pendidikan Madrasah sebesar 9%.
3. Secara keseluruhan kontribusi Komite Madrasah terhadap mutu pendidikan madrasah sebesar 23,5%. Sedangkan sisanya 76,5% lagi merupakan kontribusi gabungan dari pihak-pihak lain, seperti Guru, Kepala Sekolah, anggaran pendidikan, sarana prasarana, lingkungan masyarakat, motivasi siswa dan sebagainya. Peran dan fungsi Komite Madrasah terhadap mutu pendidikan Madrasah cukup bermakna.
4. Masih rendahnya peran dan fungsi Komite Madrasah pada aspek:
 - a. *Advisory Agency* lebih disebabkan Komite Madrasah kurang terlibat pada ranah perencanaan program yang dibuat madrasah, selain itu sebagian madrasah juga memang kurang transparan melibatkan Komite Madrasah dalam penyusunan perencanaan programnya.
 - b. *Supporting Agency* lebih disebabkan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap madrasah, selain itu juga mayoritas pendukung madrasah sebagian besar berasal dari masyarakat berekonomi lemah dan latar belakang pendidikan yang juga rendah.
 - c. *Controlling* lebih dikarenakan sebagian besar anggota Komite Madrasah belum sepenuhnya memahami mekanisme operasional pelaksanaan.

Hal ini dapat terjadi, karena belum tersedianya instrumen kontrol yang baku.

- d. *Mediator* disebabkan masih belum memadainya sarana dan dana untuk operasional Komite Madrasah.

I. Rekomendasi

Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, dapat direkomendasikan beberapa hal agar kinerja Komite Madrasah dapat maksimal, yaitu:

1. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi (melalui Bidang Mapendais) dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (melalui Seksi Mapendais) perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai tugas dan fungsi Komite Madrasah kepada semua Pengurus Komite Madrasah dan Kepala Madrasah yang berada di wilayah binaannya, sehingga diharapkan Komite Madrasah dapat memahami sepenuhnya mengenai peran dan fungsinya secara lebih baik dan dapat memahami mekanisme operasional Komite Madrasah dalam rangka membantu meningkatkan mutu pendidikan Madrasah.
2. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi maupun Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota perlu mendorong Komite Madrasah untuk terlibat dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan madrasah, termasuk penyusunan perancangan program kegiatan pendidikan madrasah.
3. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi maupun Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota perlu membentuk Forum Komunikasi antar Komite Madrasah, sehingga diharapkan adanya tukar pengalaman (*sharing experience*) dan kerjasama dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah.
4. Perlu menghadirkan Pedoman Instrumen Kontrol yang baku yang dapat dijadikan acuan Komite Madrasah dalam melakukan peran dan fungsinya dalam membantu peningkatan mutu pendidikan madrasah.
5. Ketersediaan sarana dan pembiayaan untuk operasional Komite Madrasah dapat mendorong optimalisasi peran dan fungsi Komite Madrasah dalam rangka membantu peningkatan mutu pendidikan madrasah. Untuk itu, pembiayaan penyediaan sarana dan operasional Komite Madrasah perlu diakomodasi dalam DIPA RKA-KL baik

di Direktorat Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, maupun Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota..

SUMBER BACAAN

- Agung, I.G.N. (1992): *Metode Penelitian Sosial: Pengertian dan Pemakaian Praktis Jilid 1 dan 2*. Jakarta, Gramedia.
- Crabb, George (1945): *Crabb's English Synonyms*. Grosset & Dunlap Publishers, New York.
- Dep.Agama RI (2006): *Panduan Pengembangan Peran dan Fungsi Komite Madrasah (bahan workshop pengembangan peran komite madrasah)*. Jakarta, Pusat Penelitian IAIN SUMUT Medan bekerjasama dengan LITBANG DEPAG.
- Edward, Sallis (1993): *Total Quality Mangement in Education*. London: Kogan pag.
- Engkoswara (1987): *Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan*. Depdikbud, Dirjend, Dikti, Proyek Pengembangan lptk, Jakarta.
- Fandy, Tjiptono (2000): *Total Quality Management*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, and James H. Donnelly Jr (1985): *Organizations: Behavior, Structure, and Processes*. Business Publications, Inc., Texas.
- Husein, Muhammad (2007): *Makalah Workshop Pelatihan Peningkatan Wawasan dan Ketrampilan Penelitian*. LP3ES, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno (1991): *Analisa Butir Untuk Instrumen Angket, Test, dan Skala Rating*. Jogjakarta, Penerbit Andi Offset.
- Santoso, Singgih (1987): *SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik secara Profesional*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Sentono, Suryadi Prawiro (1999): *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta, BPFE.
- Sulaiman, Wahid (2002): *Jalan Pintas Menguasai SPSS Versi 10*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Whitmore, John (Terjemahan: Dwi Helly Purnomo) [1997]: *Seni Mengarahkan Untuk Mendongkerak Kinerja*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.